

PENGARUH PENYAJIAN, AKSEBILITAS LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PINRANG

Rahma AR^{*1}, Maryadi², Hery Sugeng Waluyo³

^{*1}Program Pascasarjana Magister Manajemen, STIE Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister Manajemen, STIE Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister Manajemen, STIE Nobel Indonesia Makassar

e-mail: ¹arrahma449@gmail.com, ²ahmadmaryadi@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah diperoleh t hitung $2.071 < t$ tabel $1,671$ dan nilai signifikan t $0,043 > 0,05$, menandakan bahwa Penyajian laporan keuangan (X_1) mempunyai pengaruh Positif terhadap Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah dan analisis uji t untuk variabel Akseibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah diperoleh hasil bahwa t hitung $2,118 > t$ table $1,671$ dan nilai signifikan t $0,039 < 0,05$, menandakan bahwa Akseibilitas Laporan keuangan (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah.

Kata kunci : Penyajian, Akseibilitas, Trasnparansi, Pengelolaan Keuangan.

ABSTRACT

The results showed that the variable presentation of financial statements to the transparency of government financial management obtained t count $2.071 < t$ table 1.671 and a significant value of t $0.043 > 0.05$, indicating that the presentation of financial statements (X_1) has a positive influence on transparency in financial management Government and t -test analysis for the variable Financial Statement Acceleration on Transparency of the Government's financial management results show that t arithmetic $2.118 > t$ table 1.671 and a significant value of t $0.039 < 0.05$, indicating that the Financial Statement Acceleration (X_2) has a positive influence on Transparency and accountability for the management of Government finances.

Keywords : Presentation, Accesibility, Transparency, Financial Management.

PENDAHULUAN

Pada pendahuluan tepatnya mengenai pelaporan keuangan pada PP No. 71 tahun 2010, disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan itu sendiri adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyajikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari.

- a) Pemerintah pusat
- b) Pemerintah daerah
- c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
- d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya.

Setiap entitas pelaporan tanpa terkecuali pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi.

Sistem desentralisasi dan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan menimbulkan konsekuensi dimana pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan baik pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten/kota, harus dapat meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi pengelolaan keuangan yang mampu menyediakan semua informasi yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik yang juga dapat diakses oleh publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah lama dilaksanakan. Berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik memang belum mencapai kestabilan yang sempurna.

Dalam sistem tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), terdapat perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terlihat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Membaihnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan kemajuan signifikan membaiknya opini audit BPK selama ini, merupakan modal yang kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintah yang bersih dan akuntabel. Sebagai komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 58 (PP 58/2015) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP 58 / 2015 dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP 58 / 2015, sekaligus dapat menjadi kunci penyelenggaraan asas-asas lainnya. Pengertian lebih jauh tentang transparansi itu sendiri, terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 (Permendagri 13 / 2011) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Salah satu bentuk tanggung jawab pengembangan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. PP No. 56/2015 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 / 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 56/2015 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah menetapkan bahwa daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah, dalam hal ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri. Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance. Transparansi (Transparency) adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Dengan kemajuan teknologi dan informasi (*information technology/IT*) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan tetap mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Namun, salah satu kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terletak pada ketidakmampuan menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi mulai dari data aset, anggaran, gaji, serta proses penatausahaan, sehingga menimbulkan banyak ketidakakuratan data dalam proses akuntansi yang menghasilkan LKPD baik neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Arus Kas, Laporan Operasional, laporan saldo anggaran lebih, maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kelemahan lain pada pengelolaan keuangan daerah adalah tidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga banyak data penting yang hilang. Disamping itu, saat ini laporan keuangan cenderung masih dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan melalui internet, surat kabar atau akses publik lainnya yang menjadi sarana publik untuk menilai transparansi pemerintah, belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan.

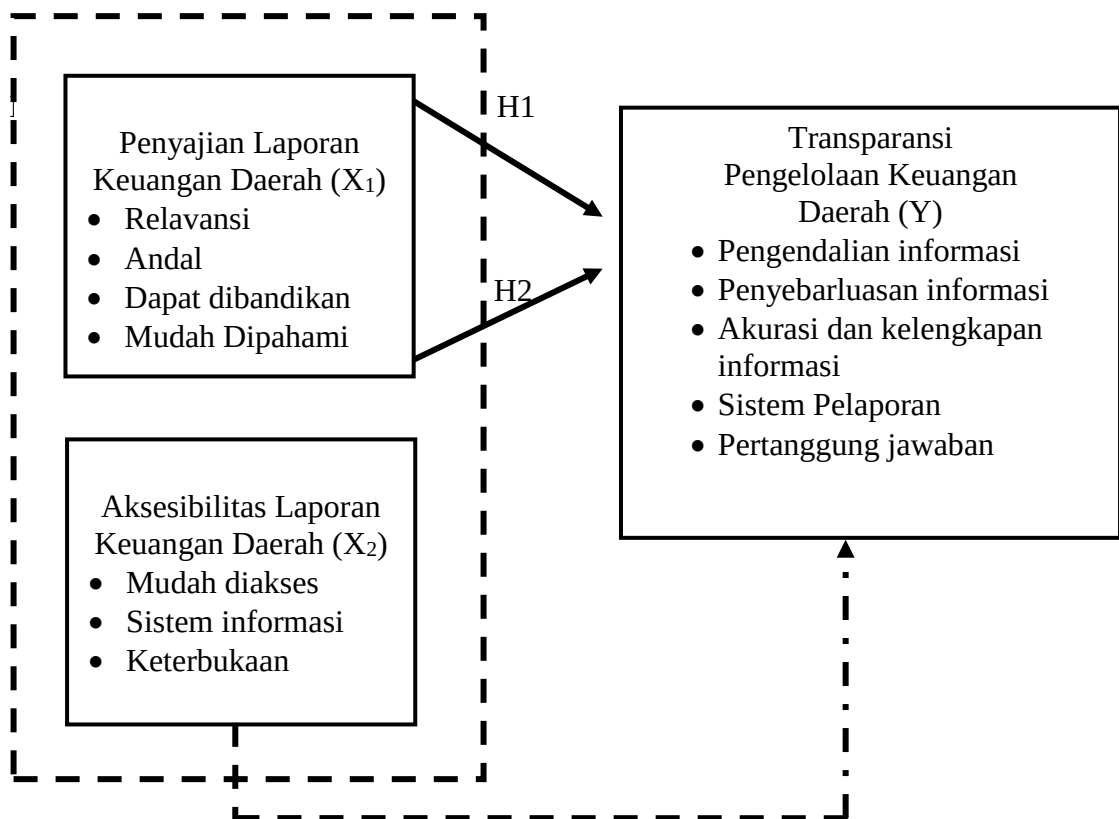
Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari single entry menuju double entry merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Di sisi lain, publikasi

laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media cetak maupun elektronik, belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 116 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat 4a yang bunyinya: “Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam Lembaran Daerah”

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan daerah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu Hanim (2009). Hasil penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Marjuki S (2011) pada Pemkab Samosir dengan penambahan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah dimana ada pengaruh positif baik secara parsial maupun simultan antara penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Penyajian laporan keuangan Bappeda berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten pinrang.

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan Bappeda berpengaruh terhadap transparansi

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang.

H₃ : Penyajian laporan keuangan Bappeda dan Aksesibilitas laporan keuangan Bappeda secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal. “Desain Kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain” (Umar, 2013).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan penyajian laporan keuangan Bappeda dan aksesibilitas laporan keuangan Bappeda sebagai variabel independen terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang ada maka penelitian ini termasuk penelitian *design cross sectional* yaitu penelitian yang melibatkan perhitungan sampel untuk digeneralisir populasinya, melalui inferensial dimana variabel diteliti pada waktu yang bersamaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda antara Penyajian Laporan Keuangan (X₁), Akseibilitas Laporan Keuangan (X₂), terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan dibantu program SPSS dalam proses perhitungannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	8.339	2.324	
Penyajian Laporan Keuangan	.293	.142	.318
Akseibilitas Laporan Keuangan	.302	.143	.326
Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah			

Sumber: Hasil Analisis Data 2020

Tabel diatas menunjukkan hasil olah data regresi atas Penyajian Laporan Keuangan (X₁), Akseibilitas Laporan Keuangan (X₂), terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hasil persamaan regresi linear berganda dari model penelitian ini yaitu:

$$Y = 8.339 - 0.293 X_1 + 0,302 X_2$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diatas, dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Konstanta a sebesar 8.339 menyatakan bahwa jika variabel Penyajian Laporan Keuangan (X_1), Aksebilitas Laporan Keuangan (X_2) tidak ada, maka Transparansi pengelolaan keuangan tetap ada sebesar $Y = 8.339$ satuan.
2. Koefisien X_1 sebesar 0.293 menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan (X_1) berpengaruh Positif terhadap Transparansi pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan pada tabel 13 yaitu sebesar 0,293 atau 29,3 persen.
3. Koefisien X_2 sebesar 0,302 menunjukkan bahwa variabel Aksebilitas laporan keuangan (X_2) berpengaruh positif terhadap Transparansi pengelolaan keuangan daerah atau dengan kata lain jika aksebilitas laporan keuangan ditingkatkan, maka prinsip-prinsip pengelolaan keuangan khususnya transparansi pengelolaan keuangan Kantor Bappeda akan tercapai dan naik sebesar 0,302 atau 30,2 persen.

Berdasarkan uraian diatas dari variabel independen tersebut, ternyata variabel Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2) yang paling dominan mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pencapaian Prinsip Pengelolaan keuangan daerah yaitu adanya keterbukaan, Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Kantor Bappeda Kabupaten Pinrang karena diperoleh angka *Standardized Coefficients* atau angka beta paling besar yaitu 0,302 atau 30,2 persen dibandingkan variabel Penyajian laporan keuangan (X_1) sebesar 0,293 atau 29,3 persen.

Pengujian hipotesis secara parsial

Uji-t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen (secara individu/parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji-t dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.339	2.324		3.588	.001
1 Penyajian Laporan Keuangan	.293	.142	.318	2.071	.043
Aksebilitas Laporan Keuangan	.302	.143	.326	2.118	.039

Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber : Hasil Analisis Data 2020

Tabel diatas menunjukkan nilai t hitung dari hasil perhitungan SPSS untuk masing-masing variabel yaitu variabel Transparansi pengelolaan keuangan diperoleh nilai t hitung 3,588 variabel Penyajian Laporan Keuangan diperoleh t hitung 0.293, variabel Penyajian Laporan keuangan diperoleh t hitung 2.071 dan variabel Aksebilitas laporan keuangan diperoleh t hitung 2,118.

1) Uji Pengaruh Variabel Penyajian laporan keuangan Terhadap Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Penyajian laporan keuangan Terhadap Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut:

- a) Menentukan formulasi hipotesis
 $H_0: b_i=0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel Penyajian laporan keuangan (X_1) terhadap variabel Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah (Y).
 $H_a: b_i<0$, artinya ada pengaruh negatif antara variabel Penyajian Laporan keuangan (X_1) terhadap variabel Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah (Y).
 $H_a: b_i>0$, artinya ada pengaruh positif antara variabel Penyajian laporan keuangan (X_1) terhadap variabel Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah (Y).
- b) Menentukan tingkat signifikan
 Taraf signifikan (α) = 0,05 maka $t_{\text{tabel}(n-k)} = t_{(55-4)} = t_{(51)} = 1,671$
- c) Nilai t hitung, dari hasil perhitungan SPSS diperoleh besarnya $t_{\text{hitung}} = 2.071$
- d) Keputusan
- e) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $2.071 < 1.671$
 H_a diterima dan H_0 ditolak apabila $2.071 > 1.671$

Dari hasil analisis uji t untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah diperoleh hasil bahwa $t_{\text{hitung}} 2.071 < t_{\text{tabel}} 1.671$ dan nilai signifikan $t_{\text{hitung}} 2.071 > 0,05$, menandakan bahwa Penyajian laporan keuangan (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah (Y). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2) Uji Pengaruh Variabel Akseibilitas Terhadap Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah.

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Akseibilitas terhadap transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut:

- a) Menentukan formulasi hipotesis
 $H_0: b_i=0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel Akseibilitas laporan keuangan (X_2) terhadap variabel Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah (Y).
 $H_a: b_i<0$, artinya ada pengaruh negatif antara Akseibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap variabel Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah (Y).
 $H_a: b_i>0$, artinya ada pengaruh positif antara Akseibilitas (X_2) terhadap variabel kinerja Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah (Y).
- b) Menentukan tingkat signifikan
 Taraf signifikan (α) = 0,05 maka $t_{\text{tabel}(n-k)} = t_{(55-4)} = t_{(51)} = 1,671$
- c) Nilai t hitung, dari hasil perhitungan SPSS diperoleh besarnya $t_{\text{hitung}} = 2.118$
- d) Keputusan
- e) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $2,118 < 1,671$
 H_a diterima dan H_0 ditolak apabila $2,118 > 1,671$

Dari hasil analisis uji t untuk variabel Akseibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah diperoleh hasil bahwa $t_{\text{hitung}} 2,118 > t_{\text{tabel}} 1,671$

table 1,671 dan nilai signifikan t $0,039 < 0,05$, menandakan bahwa Aksebilitas Laporan keuangan (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah (Y). Maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

H_0 : $b_1=b_2=0$, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen.

H_a : $b_1 \neq b_2 \neq 0$, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria:

H_0 diterima, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a diterima, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Varian (ANOVA)*. Pengujian ANOVA atau Uji F bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $< \alpha$ 0,05, maka H_0 di tolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA $> \alpha$ 0,05, maka

H_0 diterima (tidak berpengaruh). Pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ (α 0,05) maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ (α 0,05) maka H_0 diterima (tidak berpengaruh). Adapun F_{tabel} dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan (α) dan derajat bebas (*degree of freedom*).

Adapun Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	79.498	2	39.749	13.963	.000 ^a
Residual	148.030	52	2.847		
Total	227.527	54			

a. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

b. Dependent Variable: Y

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen (Penyajian laporan keuangan dan aksebilitas laporan keuangan daerah) secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen (Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah). Hasil Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.591 ^a	.349	.524	1.68722

a. Predictors: (Constant), Penyajian dan akseibilitas laporan keuangan

b. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Analisis Data 2020

Tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,524. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel Penyajian laporan keuangan dan akseibilitas pelaporan keuangan terhadap Transparansi pengelolaan keuangan pegawai Kantor Bappeda Kabupaten Pinrang sebesar 52,4 persen, sedangkan sisanya sebesar 47,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil *R Square* yang kecil ini memperlihatkan bahwa Penyajian laporan keuangan dan akseibilitas pelaporan keuangan mempunyai pengaruh yang besar dalam memberikan keterbukaan/transparansi pengelolaan keuangan pemerintah di Kantor Bappeda Kabupaten Pinrang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang ditunjukkan sebelumnya dapat disimpulkan, yaitu hasil analisis membuktikan bahwa penyajian Laporan keuangan Daerah secara positif mempengaruhi Transparansi Pengelolaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya bahwa dengan meningkatnya penyajian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang maka akan diikuti dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menjadi semakin baik.

Hasil analisis membuktikan bahwa Hasil ini menunjukan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan pemerintah Kabupaten pinrang. Artinya bahwa dengan ketidak meningkatnya Aksesibilitas laporan keuangan daerah akan mengakibatkan transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah menjadi tidak meningkat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Akseibilitas Laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan dominan terhadap Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan daerah Pemerintah kabupaten pinrang. Artinya bahwa akseibilitas dapat mempengaruhi organisasi dimana tergantung dari sejauh apa akses teknologi dan informasi keuangan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk memberi balasan atas apa yang telah diterimanya dari organisasi. Sehingga bersedia untuk bekerja keras. maka akan di ikuti dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalul (2020) . *Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada skpd kota banda aceh.*
- Ancok, D, 2013. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Anies Iqbal Mustofa (2012). *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Aliyah, Nahar, (2012) *Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.*
- Erlina dan Rasdianto, (2013), *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Brama Ardian, Medan.
- Fatrisya Pongoliu (2014). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango*
- Gunung Hasian siahaan dkk (2018). *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada skpd di kabupaten keerom*
- GASB, (2013). *Governmental accounting Standard Board*.
- Ghozali, Imam, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, edisi 9, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Hanim (2009). *Judul penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Hani Nurhayati (2013). *Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemko Bandung*
- Hanim, Sustika, (2009). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa)”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Medan.*
- Kuncoro, Mudrajad, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Lalolo, Loina Krina P, 2013. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Lucy Auditya dan Husaini Lismawati (2013) *dengan judul Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*

Mardiasmo, 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

_____, 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

_____, 2011. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2 Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 1-17.

Mirza Masyhur dkk (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai*

Marjuki Sagala (2011). *Judul penelitian yaitu Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemkab Samosir*

Mulyana, (2011) *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 56.

Noviyani, Anggia Putri Via (2018) *Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Pengawasan Intern, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Opd Se-Kabupaten Kudus)*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 Tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

_____, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*., Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2012 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

_____, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____, *Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Santosa, Pandji, 2013. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama, Bandung.

Saragih, Juli Panglina, 2013. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saufi, Iqbal Nasution, 2010 “*Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara*”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Medan.

Soekarwo, 2015. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.

Soesastro, Hadi. dkk. 2015. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir: Proses Pemulihan Ekonomi*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Septa, Purwaningrum (2018). *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo*

Saufi Iqbal Nasution (2010). *Penelitian berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*

Salomi J. Hehanussa (2015) *Dengan Judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*.

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan kedelapan , CV Alfabet, Bandung.

Umar, Husain, 2013. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, Bisnis*.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.